

Author:

Novita Cahyani Harjono Putri¹, Irna Nurhayati²

ABSTRACT

This legal research aims to analyze and compare the director responsibility in limited liability company in case of unlawful process of personal data in Indonesia and European Union ("EU"). Also, the purpose is to analyze Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection Law ("PDP Law") in order to give suggestions to Indonesia's PDP Law by analyzing EU General Data Protection Regulation ("EU GDPR").

This legal research is a doctrinal legal research which refers to normative framework. This legal research uses statutory, case, and comparative approach. In this study, literature research was conducted from both primary and secondary legal sources. Primary legal sources are mainly from PDP Law, EU GDPR, and Limited Liability Company Law. For secondary legal sources, this research analyzes several court decisions to support arguments in this Legal Research.

The results of this study is notwithstanding protection of personal data in Indonesia is provided in several regulations prior the enactment of PDP Law, the implementation of protection of personal data in Indonesia is not reflected in several cases of incidents of breach of personal data in Indonesia. However, EU GDPR has implemented protection of personal data in several cases and held director of a limited liability company personally responsible for unlawful processing of personal data. From the perspective of directors' personal liability that arised from fiduciary duties, piercing corporate veil, and ultra vires theory is already implemented in several cases in Indonesia under Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company Law. PDP Law adopted the principle of personal data from EU GDPR. However, there are several provisions in PDP Law that are vagued which can be referred to guidelines and case implementations of EU GDPR.

Keywords: *Personal Data Protection, Fiduciary Duty, Ultra Vires, Piercing The Corporate Veil.*

¹ Student at the Department of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (Batch 2022).

² Lecturer at the Department of Business Law, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

**TANGGUNG JAWAB PRIBADI DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS
PEMROSESAN DATA PRIBADI TIDAK SAH DI INDONESIA SETELAH
DISAHKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022: STUDI
BANDING ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA (EU GDPR)**

Oleh:

Novita Cahyani Harjono Putri¹, Irna Nurhayati²

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan tanggung jawab direktur di suatu perseroan terbatas jika terjadi pemrosesan data pribadi yang tidak sah di Indonesia dan Uni Eropa ("UE"). Selain itu, tujuannya adalah untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ("UU PDP") untuk memberikan saran terhadap UU PDP di Indonesia dengan menganalisis *European Union General Data Protection Regulation* ("EU GDPR").

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang mengacu pada kerangka normatif. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan komparatif. Dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan baik dari sumber hukum primer maupun sekunder. Sumber hukum primer sebagian besar berasal dari UU PDP, EU GDPR, dan UU Perseroan Terbatas. Untuk sumber hukum sekunder, penelitian ini menganalisis beberapa putusan pengadilan untuk mendukung argumentasi dalam Penelitian Hukum ini.

Hasil penelitian ini adalah meskipun perlindungan data pribadi di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan sebelum berlakunya UU PDP, namun penerapan perlindungan data pribadi di Indonesia tidak tercermin dalam beberapa kasus kejadian pelanggaran data pribadi di Indonesia. Namun, EU GDPR telah menerapkan perlindungan data pribadi dalam beberapa kasus dan meminta pertanggungjawaban direktur perusahaan secara pribadi atas pemrosesan data pribadi yang melanggar hukum. Tanggung jawab pribadi direksi yang timbul dari teori *fiduciary duty*, *piercing corporate veil*, dan *ultra vires* telah diterapkan dalam beberapa kasus di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU PDP mengadopsi prinsip data pribadi dari EU GDPR. Namun, ada beberapa ketentuan dalam UU PDP yang tidak jelas yang dapat dijadikan acuan pada pedoman dan implementasi kasus EU GDPR.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, *Fiduciary Duty*, *Ultra Vires*, *Piercing The Corporate Veil*.

¹ Mahasiswa Strata-2 (S-2) pada Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (Angkatan 2022).

² Dosen pada Departemen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.